

## **Abstrak**

Nadila Rahmatika. 2040211050154 “EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM SISTEM PERNIKAHAN ENDOGAMI DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN : ANALISIS ANTROPOLOGI FEMINIS DAN HUKUM ISLAM”, Tesis. Dibawah bimbingan Bapak Prof Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Ag (Pembimbing 1) dan Ibu Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum (Pembimbing 2). Pada Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci : Eksistensi perempuan, pernikahan endogami, antropologi feminis, hukum Islam, masyarakat adat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih bertahannya praktik pernikahan endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berpotensi membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Dalam praktiknya, keputusan perkawinan sering dipengaruhi oleh keluarga dan adat sehingga posisi perempuan tidak selalu memiliki ruang yang setara dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi perempuan dalam sistem pernikahan endogami melalui perspektif antropologi feminis dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering berada pada posisi terbatas dalam menentukan pasangan hidup karena dipengaruhi keluarga, adat, dan keinginan menjaga kehormatan keluarga. Sebagian perempuan mengalami tekanan sosial dalam menerima perjodohan, meskipun ada pula yang menerimanya sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi.

Dari perspektif antropologi feminis, perempuan dalam sistem endogami di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang juga tampil sebagai subjek yang aktif menafsirkan, menyesuaikan diri, bahkan turut menegosiasikan nilai-nilai budaya tersebut sesuai dengan kondisi sosial yang mereka hadapi. Dengan demikian, keberadaan perempuan dalam praktik endogami tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai pihak yang pasif, melainkan sebagai hasil interaksi dinamis antara individu dan kebudayaan yang membentuknya. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, pernikahan endogami merupakan praktik yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, namun tidak diwajibkan, serta harus menjamin hak perempuan untuk memberikan persetujuan secara sukarela. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mengalami transformasi sosial, sementara eksistensi perempuan menunjukkan adanya proses negosiasi antara pengaruh adat, keluarga, dan norma sosial dengan kemampuan perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.

## Abstract

Nadila Rahmatika. 2040211050154. **“Women’s Agency within the Endogamous Marriage System in Hulu Sungai Selatan Regency: A Feminist Anthropological and Islamic Law Analysis.”** Thesis. Supervised by Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Ag (Supervisor I) and Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum (Supervisor II). Family Law Study Program, Graduate School, Antasari State Islamic University Banjarmasin, 2024.

**Keywords: women’s agency, endogamous marriage, feminist anthropology, Islamic law, indigenous communities.**

This study examines the persistence of endogamous marriage practices in Hulu Sungai Selatan Regency and their implications for women’s agency in choosing a marital partner. In many cases, marital decisions are strongly influenced by family expectations and customary norms, limiting women’s opportunities to exercise independent choice. Therefore, this research aims to analyze women’s agency within the endogamous marriage system through the perspectives of feminist anthropology and Islamic law.

This research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation.

The findings indicate that women often occupy a restricted position in determining their spouses due to family influence, customary obligations, and the desire to preserve family honor. While some women experience social pressure to accept arranged marriages, others regard their acceptance as a form of respect for family traditions and cultural values.

From a feminist anthropological perspective, women within the endogamous marriage system in Pahampangan Village and Tanah Bangkang Village emerge as active agents who interpret, adapt to, and even negotiate these cultural values in accordance with the social conditions they encounter. Consequently, women's position within the practice of endogamy cannot be understood solely as that of passive participants; rather, it should be viewed as the outcome of a dynamic interaction between individuals and the cultural context that shapes their lives. Meanwhile, from the perspective of Islamic law, endogamous marriage is considered permissible as long as it does not violate Islamic legal provisions. However, it is not obligatory and must ensure a woman's right to give her free and voluntary consent. This study concludes that the practice of endogamy in Hulu Sungai Selatan Regency continues to undergo social transformation, while women's existence within the system reflects an ongoing process of negotiation between the influence of customs, family expectations, and social norms, and women's capacity to make decisions regarding their own lives.